

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
(Studi Deskriptif Pelaksanaan PKH melalui KUBE di Kampung Terbanggi
Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

(SKRIPSI)

Oleh:

NABILLA FAHRA ALMEGA

NPM 2056011012



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
(Studi Deskriptif Pelaksanaan PKH melalui KUBE di Kampung Terbanggi
Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

NABILLA FAHRA ALMEGA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

(Studi Deskriptif Pelaksanaan PKH melalui KUBE di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

Nabilla Fahra Almega

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan partisipasi masyarakat membantu PKH terlaksana dengan baik di Kampung Terbanggi Subing. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penggulangan kemiskinan di Indonesia. Jumlah penerima bantuan di Kampung Terbanggi Subing sebanyak 403 Keluarga Penerima Manfaat PKH. Penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan PKH di Kampung Terbanggi Subing dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan PKH di Kampung Terbanggi Subing melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif untuk menggambarkan masalah dan strategi penyelesaiannya berbasis partisipasi masyarakat yang dianalisis menggunakan Teori Edi Suharto tentang 3 strategi aras pemberdayaan. Penelitian ini melibatkan 9 orang informan yang terdiri dari 6 orang dari keluarga penerima manfaat, 1 pendamping PKH, 1 orang kbid KPH Dinas Sosial, dan 1 orang Kakam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan PKH di Kampung Terbanggi Subing seperti berhentinya penggunaan sistem aplikasi SIKS-NG, belum ada standar kriteria keluarga sejahtera yang akurat, ketergantungan KPM dalam penerimaan PKH, dan masih sering ditemukan masalah pada sistem administrasi calon penerima PKH. Strategi aras mikro dengan meningkatkan kesadaran anggota kelompok dibidang kesehatan dan pendidikan. Strategi aras mezzo melalui pemberian pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan kepada peserta PKH KUBE. Strategi aras makro melalui keberhasilan kelompok dalam mengembangkan usaha kolektif hewan ternak.

Kata Kunci : PKH, KUBE, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) Through Empowerment and Community Participation

(Descriptive Study of PKH Implementation through KUBE in Terbanggi Subing, Gunung Sugih, Lampung Regency)

By

Nabilla Fahra Almega

This study aims to find out the problems experienced in the implementation of the Family Hope Program (PKH) and community participation to help PKH be implemented properly in Terbanggi Subing Village. The Family Hope Program is an assistance program that is included in the first cluster of poverty alleviation strategies in Indonesia. The number of beneficiaries in Kampung Terbanggi Subing is 403 PKH Beneficiary Families. In this study, the main focus is to find out the problems experienced in the implementation of PKH in Terbanggi Subing Village and strategies in solving PKH problems in Terbanggi Subing Village through the Joint Business Group (KUBE). This study uses a qualitative method of descriptive approach to describe the problem and its solution strategy based on community participation which is analyzed using Edi Suharto's Theory of 3 empowerment level strategies. This study involved 9 informants consisting of 6 people from the beneficiary families, 1 PKH companion, 1 head of KPH Social Service, and 1 Kakam. The results of this study show that problems in the implementation of PKH in Terbanggi Subing Village such as the cessation of the use of the siks-ng application system, the lack of accurate standards for prosperous family criteria, the dependence of KPM in accepting PKH, and there are still often problems in the administrative system of prospective PKH recipients. Micro-level strategy by increasing the awareness of group members in the health and education sectors. The mezzo-level strategy is through the provision of education, socialization, and mentoring to PKH KUBE participants. Macro-level strategy through the success of the group in developing the collective business of livestock.

Keywords: PKH, KUBE, Community Empowerment, Community Participation

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN MELALUI PEMBERDAYAAN
DAN PARTISIPASI MASYRAKAT (Studi
Deskriptif Pelaksanaan PKH melalui KUBE di
Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

Nabilfa Fahira Anega

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2056011012

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Drs. Ikram, M.Si.

NIP. 19610602 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

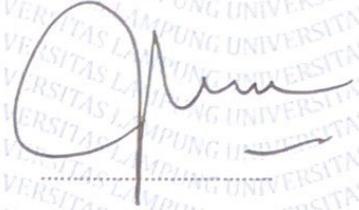
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ikram, M.Si.**



Penguji Utama : **Damar Wibisono, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Ujian Sidang Skripsi: **05 Agustus 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Nabilla Fahra Almega

NPM. 2056011012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nabilla Fahra Almega, dilahirkan di Terbanggi Subing, pada tanggal 09 Oktober 2001 yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Patulloh Ali KM dan Ibu Kartini. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari TK Pertiwi pada tahun (2006-2007), dilanjutkan di SD Negeri 1 Terbanggi Agung pada tahun (2007-2013). Setelah lulus, penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar pada tahun (2013-2016) dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun (2016-2019). Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa jurusan Sosiologi pada bagian Pengabdian Masyarakat. Pada Tahun 2023 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 10 Agustus 2023 – 10 Januari 2024 di Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah “

(Q.S. Al-Ghafir: 44)

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing”

(Q.S. Maryam : 4)

“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka akan bersinar saat waktunya tiba”

(BJ Habibie)

“Kesuksesan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti mencoba”

(Nabilla Fahra Almega)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'amin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Kedua Orang Tua

Bapak Patulloh Ali KM dan Ibu Kartini

Keluargaku

Kakak-kakakku tersayang, Syaidina Iskandar Malik KM, Ghita Patrizia Almega dan Rudi Syah serta keponakanku M. Adzriel Rafiq.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Terimakasih telah memberikan ilmu dan bimbingannya yang sangat berguna untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Sahabat-sahabatku

Terimakasih karena selalu menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat (Studi Deskriptif Pelaksanaan PKH Melalui KUBE Di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan penulis kekuatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan serta memberikan penulis kemudahan yang pada akhirnya karya sederhana ini dapat selesai dengan tepat waktu.
2. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dan banggakan, Papa Patulloh Ali KM dan Mama Kartini, untuk papa dan mamaku tercinta terimakasih telah menjadi *support system* terbaik, yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, dukungan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang yang tulus dan selalu memfasilitasi segala kebutuhan penulis. Papa dan mama adalah salah satu alasan nabilla untuk tetap bertahan selama ini, salah satu tujuan hidup nabilla, semoga kelak nabilla bisa membanggakan papa dan mama. Kasih sayang yang telah papa dan mama berikan, semua ini tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Semoga Allah SWT

memberikan umur yang panjang, kesehatan, perlindungan serta limpahan rahmat kepada papa dan mama yang sangat penulis cintai.

3. Kakak-kakakku tersayang, Syaidina Iskandar Malik KM, Ghita Patrizia Almega dan Rudi Syah terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini
4. Keponakanku yang sangat aku sayangi M. Adzriel Rafiq, terima kasih telah hadir di dunia ini, memberikan warna yang sangat indah di kehidupan penulis, menjadi penyemangat penulis dan selalu menemani penulis dimasa-masa sulitnya.
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S..E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
6. Ibu Drs. Ida Nurhida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
9. Bapak Damar Wibisono, S. Sos., M. A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung sekaligus dosen pembahas, penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran dan masukan yang telah bapak berikan selama menjadi dosen pembahas, tentunya membuat penulis termotivasi untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik lagi, sehingga penulis dapat melaksanakan sidang akhir. Semoga Allah SWT memberikan Bapak kesehatan, perlindungan serta limpahan rahmatnya.
10. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membantu mengarahkan serta memberikan saran, kritik dan masukan yang membangun dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak berlipat-lipat ganda, selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

11. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., MA selaku dosen pembimbing akademik terima kasih telah menjadi pembimbing akademik yang sangat baik, selalu mengarahkan, serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama duduk dibangku perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada Bapak/Ibu semua, terima kasih atas dedikasinya sehingga penulis dapat berada diposisi ini.
13. Staff administrasi Jurusan Sosiologi, Mas Edy dan Mas Daman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian surat dan berkas selama perkuliahan sampai sidang akhir.
14. Kak Zikri selaku asisten dosen yang telah memberikan saran, masukan serta kritik dalam penyelesaian skripsi.
15. Bripda dengan NRP 01070526 terima kasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta telah meluangkan waktunya untuk selalu menemani penulis dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ternyaman, tempat berkeluh kesah, tempat sandaran dimasa-masa sulit penulis. Terima kasih telah mengiringi perjalanan penulis dari SMA hingga saat ini.
16. Sahabat-sahabatku, Fadhilah Fauza Hamda, Qori Maulani dan Bella Yurida terima kasih telah membersamai penulis dari SMA sampai saat ini, memberikan perhatian, dukungan, dan semangat untuk penulis, sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku Landani Genk, (Hernitia Gusse Puspita, Kornelia Aura Gatra, Deta Putie Andam Z, Nurlaili Zahra Fajriyah, dan Gustya Disha Suwandi) Terima kasih telah membuktikan bahwa teman-teman di bangku perkuliahan tidak seburuk itu. Terima kasih atas semua momen-momen indah yang telah kalian berikan selama kurang lebih 4 tahun kita bersama. Penulis sangat menyayangi kalian, suka dan duka, senang dan sedih kita lalui bersama, kalian adalah salah satu tempat pulang ternyaman penulis dan tempat berkeluh kesah, terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang

yang kalian berikan kepada penulis, semua itu tidak akan bisa digantikan dengan apapun, dan untuk landani terima kasih telah menyatukan kami ditempat ini serta menjadi saksi dari semua kisah perjalanan hidup kami di masa perkuliahan.

18. Teman-teman KKN (Tata, Upit dan Abel) terima kasih telah kebersamai penulis selama 40 hari dan telah memberikan pengalaman baru untuk penulis.
19. Untuk teman-teman Sosiologi 2020 yang telah memberikan pengalaman, dukungan, kebersamaan dan ilmu selama berproses di masa perkuliahan. Semoga silaturahmi dapat terus terjalin dengan baik.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Penulis,

Nabilla Fahra Almega

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Tentang Kemiskinan	10
2.1.1. Pengertian Kemiskinan	10
2.1.2. Klasifikasi Kemiskinan.....	11
2.1.3. Faktor Penyebab Kemiskinan	12
2.2. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	13
2.2.1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH).....	13
2.2.2. Tujuan Utama Program Keluarga Harapan.....	14
2.3. Kriteria Penerima Manfaat PKH.....	15
2.4. Graduasi KPM PKH	17
2.5. Tinjauan Tentang Pengentasan Kemiskinan	19
2.6. Tinjauan Tentang Pemberdayaan	21
2.6.1. Definisi Pemberdayaan	21
2.6.2. Tujuan Pemberdayaan.....	22
2.6.3. Pendekatan Pemberdayaan.....	23
2.6.4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE	23
2.6.5. Program KUBE Terbanggi Subing	24
2.7. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat	24

2.7.1. Definisi Partisipasi	24
2.8. Landasan Teori	27
2.9. Penelitian Terdahulu	28
2.10. Kerangka Berpikir	31
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Tipe Penelitian	33
3.2. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. Fokus Penelitian.....	35
3.4. Kriteria Informan	35
3.5. Sumber Data.....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Informasi	37
3.7. Teknik Analisis Data	38
3.8. Teknik Keabsahan Data	40
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
4.1. Sejarah Kampung Terbanggi Subing	42
4.2. Profil Kampung Terbanggi Subing	43
4.3. Visi Misi Kampung	45
4.4. Sarana dan Prasarana	46
4.5. Kondisi Kependudukan.....	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1. Profil Informan.....	48
5.2. Hasil Penelitian	52
5.2.1. Permasalahan Pelaksanaan PKH di Kampung Terbanggi Subing	53
5.2.2. Strategi Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Dalam KUBE....	57
5.3. Pembahasan.....	61
5.3.1. Permasalahan Pelaksanaan PKH di Kampung Terbanggi Subing	62
5.3.2. Strategi Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Dalam KUBE....	64
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	68
6.1. Kesimpulan	68
6.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2. Peta Wilayah Kampung Terbanggi Subing	44

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia Tahun 2023 .	3
Tabel 2. Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah	7
Tabel 3. Besaran Dana Bantuan Pokok PKH	17
Tabel 4. Tabel Penelitian Terdahulu	29
Tabel 5. Daftar Pejabat Kepala Kampung Terbanggi Subing	43
Tabel 6. Batas Wilayah Kampung Terbanggi Subing	44
Tabel 7. Demografis Kampung Terbanggi Subing	49
Tabel 8. Daftar Informan Penelitian	49

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menggambarkan sebuah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang atau sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari strategi nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat negara tersebut secara keseluruhan. Namun selain strategi nasional tersebut, negara dalam upaya menanggulangi kemiskinan juga mengacu pada kebijakan internasional (Kusumawardani, 2021).

Kebijakan internasional yang mendukung pengentasan kemiskinan adalah *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mana hal tersebut memiliki poin yang menjadi acuan guna mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara yang ikut menandatangani deklarasi SDGs bersama dengan PBB, Indonesia harus memiliki komitmen untuk melaksanakan program-program yang relevan dengan strategi nasional Indonesia untuk diimplementasikan berkaitan dengan program yang berimplikasi pada pengentasan kemiskinan. Hal tersebut didasari oleh karena Indonesia masih menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan utama bagi pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini menjadi salah satu permasalahan utama yang harus dibenahi dan dituntaskan, terutama setelah krisis saat Indonesia dan Dunia mengalami pandemi COVID-19 yang lalu, yang mana berpotensi

untuk meningkatkan angka kemiskinan apabila tidak dimanajemen dengan baik.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat agar dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diberantas atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan ekonomi secara umum adalah kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Istilah “negara berkembang” digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Secara umum, kemiskinan diartikan suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok untuk menjamin kehidupan sehari-harinya, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup secara berkelanjutan (Suryawati, 2005).

Kemiskinan yang menjadi salah satu isu terhambatnya pembangunan. Kemiskinan menjadi masalah sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup dengan layak (Yustina, 2021).

Kemiskinan di Indonesia merupakan kasus utama dari permasalahan sosial yang menjadi studi kasus yang tak pernah selesai. Kemiskinan selalu menjadi perhatian dari pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Menurut (Permana, et.al, 2018) kemiskinan dapat menyebabkan efek signifikan yang cenderung menyebar (*multiplier effects*) bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Keadaan tersebut membuat

masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder mereka sendiri. Oleh karena itu, beragam permasalahan kemiskinan yang memerlukan upaya penyelesaian dan pencegahan yang tepat serta menyeluruh, sehingga dapat mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakann secara terpadu dan terorganisir dengan baik.

Tabel 1. Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Provinsi	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)			Persentase
			Perkotaan	Perdesaan	Total	
1	Jawa Timur	41.416	1.703,74	1.969,84	4.188,81	10,11%
2	Jawa Barat	48.782	2.914,24	974,36	3.888,60	7,97%
3	Jawa Tengah	37.032	1.821,66	1.969,84	3.791,50	10,23%
4	Sumatera Utara	15.115	189,16	529,73	1.239,71	8,2%
5	NTT	5.541	135,57	1.005,55	1.141,11	20,59%
6	Sumatera Selatan	8.657	371,75	673,93	1.045,68	12,07%
7	Lampung	9.176	232,96	737,71	970,67	10,57%
8	Papua	3.598	58,67	856,48	915,15	20,71%
9	Banten	12.381	623,19	202,93	826,13	6,7%
10	Sulawesi Selatan	9.312	211,48	577,37	788,85	8,47%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2023

Kasus kemiskinan di Indonesia saat ini adalah angka kemiskinan mencapai 25.8 juta jiwa dengan persentase mencapai 9,36% dari jumlah penduduk keseluruhannya. Sedangkan menurut urutan teratas di Negara Indonesia, Lampung berada di posisi 10 besar dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 970 ribu jiwa atau 10,57% dari penduduk Lampung secara keseluruhan. Keadaan tersebut tentu dipicu oleh banyaknya masyarakat baik di desa maupun kota yang memiliki penghasilan di bawah kondisi yang sudah ditetapkan oleh bank dunia. Adapun kondisi penghasilan standar

untuk garis kemiskinan adalah USD 1,9 per hari atau sekitar Rp. 29.241 per hari untuk berada di garis kemiskinan. Dari keadaan tersebut, ada 25,90 juta masyarakat Indonesia (9,28%) yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, pemerintah tentu memiliki program yang berfungsi untuk mengintervensi kemiskinan yang ada di wilayah seluruh Indonesia, baik diperkotaan ataupun perdesaan. Kartasasmita (1996) menjelaskan bahwa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, yaitu terkait dengan kebijakan tidak langsung yang bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung upaya penganggulangan kemiskinan. Kedua, yaitu kebijakan langsung yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, selanjutnya, ketiga kebijakan khusus yang bertujuan untuk bisa mempersiapkan masyarakat miskin serta petugas atau aparat yang bertanggung jawab agar program berjalan lancar, serta mendorong dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui Kementerian Sosial ialah Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dibawah naungan Dinas Sosial, salah satu instansi pemerintah di bidang sosial. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia. Program ini memiliki tujuan dan fokus yaitu agar dapat mengembangkan sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin yang ada di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan pada tahun 2007 sebagai bentuk upaya dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan kebijakan perlindungan sosial. Beberapa negara telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer* (CCT), yang terbukti cukup berhasil dalam mengatasi kemiskinan (Kusumawardani, 2021). Selam aini, PKH berfungsi membantu perekonomian rumah tangga sangat miskin memepertahankan daya beli ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH juga bertujuan membangun sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin guna

mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia sehingga dengan begitu program ini dapat memutus rantai kemiskinan yang sudah lama terjadi.

Melalui PKH (Program Keluarga Harapan), keluarga penerima manfaat (keluarga pra-sejahtera) didukung agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan layanan sosial yang tersedia yaitu seperti, kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan. Selain itu, mereka juga diberi akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai program perlindungan sosial lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai program komplementer yang berkelanjutan. PKH bertujuan menjadi pusat unggulan dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program PKH ini bertujuan untuk jangka pendek untuk dapat mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat, serta tujuan jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat terbebas dari perangkap atau jerat kemiskinan yang dialami oleh keluarga mereka PKH ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat, meningkatkan taraf pendidikan, anak-anak dari keluarga tersebut, serta meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita dari keluarga pra-sejahtera. Selanjutnya, PKH ini diharapkan tidak hanya mampu untuk menurunkan angka kemiskinan saja, namun juga dapat meningkatkan sumber daya manusia di kalangan masyarakat miskin, tetapi juga memutus rantai kemiskinan yang telah dialami keluarga pra-sejahtera selama bertahun-tahun.

PKH merupakan program yang telah dirumuskan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga yang termasuk dalam program bantuan sosial secara terpadu. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Sebagai program yang direncanakan secara

terpusat, pelaksanaannya melibatkan banyak aspek dan pihak, Hal ini memungkinkan adanya penyimpangan dari peraturan selama pelaksanaan. Selain itu, pelaksanaan PKH di Tingkat local juga mungkin menghadapi berbagai masalah. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk penanggulabgannya kemiskinan, termasuk dalam kluster pertama strategi penganggulangan keimiskinan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memenuhi persyaratan terkait upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM). Program Keluarga Harapan ini salah satu bantuan tunai yang memiliki syarat dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Melalui PKH (Program Keluarga Harapan), keluarga pra-sejahtera (Keluarga Penerima Manfaat) didorong dan diarahkan agar dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, Selain itu, masyarakat penerima manfaat juga diberi akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai program komplementer yang berkelanjutan. PKH bertujuan menjadi pusat unggulan dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Keberadaan PKH bertujuan yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM, meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita KPM. Selanjutnya, PKH diharapkan tidak sekedar mampu menurunkan angka kemiskinan tetapi dapat juga memutus mata rantai kemiskinan yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Saat ini, Indonesia memiliki 25 program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga, dan kelompok tidak mampu yang disalurkan oleh beberapa kementerian. Di bawah naungan Kementerian Sosial, terdapat delapan program yang terbagi dalam dua bidang, yaitu Bidang Pangan dan Bidang Sosial dan Ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) berada di Bidang Sosial dan Ekonomi

dengan anggaran tertinggi dibandingkan dengan program bantuan pemerintah lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, realitasnya berbeda. Meskipun PKH telah diluncurkan di Indonesia sejak tahun 2007, hingga kini program tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakat secara optimal, termasuk Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di Kampung Terbanggi Subing. Dibuktikan dengan cukup banyak jumlah penerima PKH yang berstatus ekonomi lemah atau tidak mampu secara ekonomi, sehingga menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tabel 2. Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah

Nama Kampung	Jumlah KPM
Bangun Rejo	182
Buyut Ilir	193
Buyut Udik	245
Buyut Utara	232
Fajar Bulan	241
Gunung Sari	334
Gunung Sugih	361
Gunung Sugih Raya	360
Komring Agung	419
Komring Putih	418
Putra Buyut	266
Seputih Jaya	266
Terbanggi Agung	325
Terbanggi Subing	403
Wono Sari	165

Sumber: Data Primer Tahun 2023

Gambaran dari tabel tersebut adalah bahwasanya penerima manfaat PKH di wilayah Gunung Sugih, yang mana masih ada ribuan penerima PKH yang berarti bahwa di wilayah Gunung Sugih masih banyak warga dengan status miskin yang menerima PKH meskipun program tersebut sudah berjalan selama belasan tahun. Di Terbanggi Subing sendiri, jumlah penerimanya adalah sebanyak 403 orang, yang merupakan peringkat 3 terbesar penerima PKH se-Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Hal tersebut mengarahkan bahwa ada yang salah dengan implementasi PKH di Gunung Sugih sehingga masih banyak KPM yang bertahan dengan statusnya.

Hal tersebut membuat pendamping PKH di Kampung Terbanggi Subing mengupayakan beberapa cara dan optimalisasi cara pembangunan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat, yang mana banyak masyarakat KPM dilibatkan untuk membangun ekonomi secara kolektif yang dimulai dari diri mereka. Adapun bentuk pembangunan ekonominya adalah melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dikhususkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program PKH.

Tentunya, program tersebut menuntut partisipasi aktif dari setiap penerima manfaat, yang mana kegiatan ini dilakukan agar dapat menghilangkan kesan bahwa upaya dalam penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab untuk pemerintah. Namun, partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati dengan kondisi keluarganya. Mereka yang menerima PKH ditempatkan dalam beberapa kelompok kecil untuk berusaha, mengupayakan sesuatu yang baru dengan orientasi meningkatnya kesejahteraan atau aset yang sudah dimiliki dalam kelompok tersebut.

Hal tersebut membuat peneliti ingin melihat bagaimana program PKH yang sesungguhnya dijalankan oleh pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, termasuk upaya pendamping yang membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dari bawah. Hal tersebut akan membuat masyarakat berkembang, dengan prinsip yang sebelumnya memberikan bantuan langsung sesuai dengan jumlah anak dan pendidikannya, namun disamping itu KPM PKH juga memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbasis partisipasi masyarakat, yang menuntut masyarakat penerima manfaat untuk bisa mengelola uang dari pencairan PKH melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dimiliki oleh beberapa kelompok penerima manfaat PKH di Kampung Terbanggi Subing. Hal tersebut diharapkan agar dapat menjadi strategi untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan beberapa “trigger” bagi masyarakat untuk bisa berusaha dan bebas dari perangkap kemiskinan melalui apa yang mereka lakukan dan usahakan secara bersama-sama.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja masalah yang dialami dalam pelaksanaan PKH di Kampung Terbanggi Subing?
2. Bagaimana strategi penerapan PKH berbasis partisipasi masyarakat di Kampung Terbanggi Subing?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan PKH di Kampung Terbanggi Subing.
2. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat bisa membantu PKH terlaksana dengan baik di Kampung Terbanggi Subing.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat ketika melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pemikiran ilmu sosial, khususnya sosiologi perdesaan yang menggambarkan keadaan sosial di Desa yang mayoritas mengalami kemiskinan, serta bagaimana program penanggulangan kemiskinan tersebut melalui partisipasi masyarakat Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang juga memiliki ketertarikan dan akan melakukan penelitian pada masyarakat penerima PKH.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kemiskinan

2.1.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023).

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Soekanto, 1999). Seseorang dikatakan mengalami kondisi yang miskin apabila kesulitan untuk dapat membayar atau memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2.100 kalori per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (Suharto, 2015). Menurut Oscar Lewis kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti: malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti: brokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya (Suharto, 2015).

2.1.2. Klasifikasi Kemiskinan

Klasifikasi Kemiskinan terbagi menjadi dua pembagian, berdasarkan tingkatan kelompok di masyarakat serta berdasarkan tingkatan dan sifatnya (Setiawan, 2011). Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan berdasarkan tingkatan kelompok :
 - a. ***Destitute*** adalah golongan masyarakat paling bawah dan termiskin, dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan yang ditentukan. Mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang lain dan juga tidak memiliki kesempatan untuk mengakses layanan sosial yang tersedia.
 - b. ***Poor Group*** adalah golongan masyarakat dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan. Mereka memiliki sumber pendapatan lain dan juga memiliki kesempatan untuk mengaskses layanan sosial yang tersedia.
 - c. ***Near Poor*** adalah golongan masyarakat yang nyaris berada di garis kemiskinan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan ekonomi yang dapat mengganti status menjadi miskin jika tidak ada bantuan sosial dari pemerintah atau pihak lainnya.
2. Kemiskinan berdasarkan sifat (Suryawati, 2005):
 - a. ***Natural Poverty*** adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, prasarana umum yang kurang memadai, serta kondisi tanah yang tidak subur atau sulit diolah sehingga tidak dapat menopang kehidupan.
 - b. ***Artificial Poverty*** adalah kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada di suatu negara secara merata. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang semakin nyata, dengan jumlah masyarakat miskin yang bertambah dan tidak mampu mencapai tingkat ekonomi yang sesuai dengan garis kemiskinan.

2.1.3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Spicker dalam (Wahyudi & Rejekiningsih, 2013), mengungkapkan bahwa terdapat faktor penyebab kemiskina yang terbagi menjadi empat kategori berbeda, yaitu :

- a. *Individual Explanation*. Kemiskinan disebabkan oleh karakteristik pribadi orang miskin, seperti kemalasan, kekurangan individu, atau berbagai jenis keterbatasan atau cacat. Seseorang bisa menjadi miskin karena membuat keputusan yang salah, memiliki anak pada waktu yang tidak tepat, gagal bekerja, dan sebagainya.
- b. *Familial*. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan, di mana kondisi tidak menguntungkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui pola asuhan maupun pendidikan.
- c. *Subcultural Explanation*. Kemiskinan yang diakibatkan oleh pola perilaku tertentu, tetapi lebih dipengaruhi oleh keadaan daripada pilihan pribadi.
- d. *Structural Explanation*. Kemiskinan diidentifikasi sebagai hasil dari struktur masyarakat setempat. Kemiskinan menciptakan kesenjangan yang diinterpretasikan melalui divisi sosial, kelas, status, atau garis keturunan

World Bank (dalam Salman, 2018) merinci penyebab dasar kemiskinan adalah :

- a. Ketidakmampuan dalam kepemilikan seperti tanah dan modal.
- b. Keterbatasan akses dan ketersediaan kebutuhan dasar serta fasilitas penunjang yang lain.
- c. Kebijakan pembangunan yang terpusat, serta bias terhadap perkotaan dan sektor tertentu.
- d. Ketidaksetaraan peluang di dalam masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- e. Perbedaan sumber daya manusia dan disparitas antara sektor ekonomi tradisional dan modern.
- f. Produktivitas dan pembentukan modal dalam masyarakat yang rendah.

- g. Budaya hidup yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- h. Tidak adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak efektif.

2.2. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. PKH merupakan salah satu Upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. PKH berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfer (CCT)*, yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. Program ini “bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka

membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin (Kementerian Sosial, 2021).

2.2.2. Tujuan Utama Program Keluarga Harapan

Menurut Kementerian Sosial RI (2021) tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan masyarakat miskin. Tujuan ini juga mendukung percepatan pencapaian target pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, tujuan PKH meliputi:

- a. Meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH.
- c. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH.
- d. Mendorong perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan layanan kesejahteraan sosial.
- e. Memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.

Selain tujuan khusus, PKH juga memiliki tujuan umum, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di dalam masyarakat.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Hal tersebut dimaksudkan agar keluarga penerima manfaat (KPM) mampu menikmati pelayanan sosial dasar yang dijamin oleh negara. Hal tersebut antara lain pelayanan sosial kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka

mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan dalam RPJMN dan PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Menurut Kementerian Sosial (2021) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dikategorikan berdasarkan komponen kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan dalam masyarakat, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke kebutuhan dasar yang penting untuk perkembangan dan kesejahteraan mereka. Setiap komponen memiliki kriteria tertentu dengan rincian sebagai berikut :

1. Komponen Kesehatan

- a) Ibu Hamil/Nifas/Menyusui: Ibu yang sedang hamil, berada dalam masa nifas, atau menyusui, yaitu kondisi di mana seseorang sedang mengandung atau merawat bayi yang baru lahir.
- b) Anak Usia Dini: Anak berusia 0-6 tahun (dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

Bantuan diberikan kepada ibu hamil/nifas/menyusui untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Anak-anak usia dini juga menjadi prioritas, dengan tujuan memastikan mereka mendapatkan nutrisi dan perawatan kesehatan yang baik di masa awal kehidupan mereka.

2. Komponen Pendidikan

Anak Usia Sekolah: Anak berusia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar, mencakup tingkat pendidikan dari SD, SMP hingga SMA. Anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin didukung untuk tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan wajib belajar. Ini penting untuk memutus siklus kemiskinan, karena pendidikan yang baik membuka peluang lebih besar untuk pekerjaan dan pendapatan yang layak di masa depan.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- a. Lanjut Usia: Orang yang sudah lanjut usia dan terdaftar dalam kartu keluarga yang sama serta berada dalam keluarga tersebut.
- b. Penyandang Disabilitas Berat: Orang dengan disabilitas berat yang tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan bergantung pada orang lain sepanjang hidupnya. Mereka tidak mampu menghidupi diri sendiri dan terdaftar dalam kartu keluarga yang sama serta berada dalam keluarga tersebut.

Orang lanjut usia dan penyandang disabilitas berat mendapatkan perhatian khusus karena mereka sering kali memerlukan bantuan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan dan tetap memiliki kualitas hidup yang layak.

Setiap individu yang dapat memenuhi kriteria penerima manfaat KPH maka akan mendapatkan bantuan dana. Bantuan ini akan diberikan setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya, secara berkala akan dilakukn evaluasi oleh tim pendamping PKH desa untuk melihat keberlanjutan dari penerima manfaat PKH tersebut.

Tabel 3. Besaran Dana Bantuan PKH

Penerima Bantuan PKH	Besaran Dana Bantuan PKH (Rp/Tahun/RTSM)
Kategori Anak Usia Dini 0 – 6 Tahun	Rp3. 000.000,-
Kategori Ibu Hamil/Nifas	Rp3. 000.000,-
Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp900.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp1. 500.000,-
Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp2. 000.000,-
Kategori Penyandang Disabilitas Berat	Rp2. 400.000,-
Kategori Lanjut Usia	Rp2. 400.000,-

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berikut ini merupakan rincian besaran dana PKH berdasarkan beberapa komponen tersebut: Komponen kesehatan: Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun; Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun. Komponen pendidikan: Anak umur 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar; Anak SD/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun; Anak SMP/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun; Anak SMA/ sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

2.4. Graduasi KPM PKH

Menurut Kementrian Sosial RI (2021) Graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berarti tidak terpenuhinya kriteria sebagai peserta KPM PKH atau penerima manfaat secara bertahap meningkatkan kemandiriannya sehingga tidak lagi memerlukan bantuan dari program tersebut, kemudian graduasi ini dilakukan melalui permuktahiran data. Secara umum, graduasi berarti proses atau tahapan di mana seseorang atau kelompok mengalami perubahan dari kondisi atau status awal menuju keadaan yang lebih baik atau lebih mandiri. Graduasi peserta PKH yang memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH
2. Tidak miskin tetapi masih memenuhi syarat PKH
3. Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat PKH

Graduasi dibagi kedalam dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. Graduasi Alamiah

Graduasi Alamiah terjadi ketika kepesertaan seseorang dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berakhir karena kondisi keluarga penerima manfaat (KPM) sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan lagi, atau dengan kata lain, mereka telah mencapai tingkat kemandirian. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak adanya pengurus kepesertaan dalam keluarga tersebut atau hilangnya salah satu komponen kepesertaan seperti kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial.

Graduasi alamiah bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan PKH diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, dan secara berkala mengevaluasi penerima manfaat untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Ini juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

2. Graduasi Sejahtera Mandiri

Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan mereka dianggap mampu secara sosial dan ekonomi, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai KPM. Graduasi ini terbentuk karena dorongan pendamping PKH atau inisiatif KPM sendiri. KPM yang merasa sudah mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Perubahan status ekonomi KPM menjadi lebih sejahtera bisa disebabkan oleh mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik (termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Indikator keberhasilan program PKH ini yaitu adanya graduasi mandiri, di mana keluarga yang menerima manfaat secara sukarela mengundurkan diri atau melepaskan diri dan tidak lagi menerima bantuan yang telah

mereka peroleh. Adanya upaya graduasi mandiri ini memiliki tujuan untuk dapat memperkuat kemampuan para penerima PKH dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Hal ini dilkaukan karena penerima PKH. Oleh karena itu, mereka harus menjadi mandiri dengan memanfaatkan bantuan yang telah diterima sehingga tidak bergantung lagi pada pemerintah. Namun, terkadang meskipun merasa mampu, tidak banyak penerima PKH yang bersedia melakukan graduasi mandiri. Oleh sebab itu, pendamping PKH harus melakukan sosialisasi terkait dengan graduasi mandiri. Keputusan untuk memilih graduasi mandiri harus berasal dari kesadaran diri sendiri atau individu masing-masing.

2.5. Tinjauan Tentang Pengentasan Kemiskinan

Untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia hingga 8% sampai 10% pada tahun 2024. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengelompokkan kebijakan pengentasan kemiskinan ke dalam tiga cluster sebagai berikut:

a. Cluster I

Kelompok kebijakan ini berfokus pada bantuan dan perlindungan sosial. Tujuan utamanya adalah memenuhi hak dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan secara langsung dan mencakup Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kebijakan ini berfokus pada memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kesehatan, pangan, dan pendidikan. Program-program seperti JAMKESMAS, RASKIN, BSM, dan PKH bertujuan untuk menyediakan jaminan kesehatan, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan dukungan

langsung bagi keluarga miskin. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih layak.

b. *Cluster II*

Kelompok kebijakan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemberdayaan, sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Program yang termasuk dalam cluster ini adalah PNPM Mandiri.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mereka dapat mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Program PNPM Mandiri adalah salah satu contoh dari pendekatan ini, di mana masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di komunitas mereka. Pendekatan ini membantu masyarakat miskin menjadi lebih mandiri dan berdaya, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

c. *Cluster III*

Kebijakan ini berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk berusaha dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menyediakan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program yang termasuk dalam cluster ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kebijakan ini memberikan dukungan kepada masyarakat miskin untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro. Program KUR, misalnya, memberikan akses modal atau pembiayaan dalam skala mikro, sehingga masyarakat miskin memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kemandirian finansial masyarakat miskin.

2.6. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

2.6.1. Definisi Pemberdayaan

Menurut Jim Ife dalam buku “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,” pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Suharto, 2021).

Pemberdayaan adalah sebuah rangkain untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat tidak berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil. Sedangkan dalam judul skripsi ini pemberdayaan yang dimaksud adalah usaha atau cara dari seseorang atau kelompok dalam hal ini adalah pemerintah untuk memberikan kekuatan berupa materiil maupun non materiil kepada seseorang atau kelompok yang lemah di dalam masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Nasional, 2015)

2.6.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menciptakan individu yang mandiri secara berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang masyarakat lakukan tersebut. Pemberdayaan sangat lekat dengan kemiskinan dan sebuah ketidakberdayaan yang dialami oleh kelompok minoritas ataupun kelompok yang kurang beruntung.

Menurut Suharto (2021) tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat masyarakat, terutama bagi kaum lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik itu karena kondisi internal seperti persepsi yang dibuat oleh diri sendiri, alienasi atau sebagainya, maupun dari kondisi eksternal seperti kondisi yang disebabkan oleh struktur dan kebijakan yang ada. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah berdasarkan struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian serta masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Kelompok-kelompok lemah yang mengalami deskriminasi dalam suatu masyarakat seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. PKH sebagai salah satu program kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keberdayaan bagi KPM PKH untuk mengetas kemiskinan melalui akses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga membuat KPM PKH lebih berdaya dan mandiri.

2.6.3 Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Suharto (2021) Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, diantaranya:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan atau dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

2.6.4 Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE

KUBE dalam PKH merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga penerima manfaat PKH melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama. Tujuan utama dari pembentukan KUBE dalam PKH adalah untuk membantu rumah tangga penerima manfaat meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan usaha ekonomi bersama. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat secara bertahap mandiri dari bantuan sosial PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Selain memberikan bantuan tunai bersyarat PKH juga memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan keluarga yang diberikan oleh petugas pendamping dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), terutama pada kelompok keluarga sangat miskin, berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi,

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. Pendamping KUBE PKH Terbanggi Subing merupakan seorang pendamping PKH itu sendiri. Keuntungan dari pendampingan PKH yang menjadi pendamping KUBE dalam berkomunikasi dan tentunya sudah saling memahami karakteristik satu dengan lainnya karena sudah terbiasa berinteraksi khususnya dalam pertemuan P2K2 setiap satu bulan sekali. Kegiatan ini juga dilakukan agar para peserta nantinya dapat lebih percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih mandiri, meskipun program PKH sudah tidak lagi membantu mereka dengan dukungan dana bantuan tunai.

2.6.5 Program KUBE Terbanggi Subing

KPM PKH KUBE Kampung Terbanggi Subing mulai didirikan pada tahun 2019 dan hingga saat ini masih berjalan aktif. Hadirnya KUBE ini sebagai wujud pemberdayaan dan partisipasi aktif dari KPM PKH dalam menciptakan kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Kelompok ini memiliki struktur organisasi dan memiliki program pemberdayaan yang berfokus pada pengembangan usaha dalam bidang peternakan hewan kambing. Hasil usaha ini memiliki manfaat jangka panjang, dimana proses tersebut dilakukan dengan terus mengembangkan jumlah kambing lalu akan menjualnya kemudian dilakukan bagi hasil antara anggota KPM PKH KUBE dengan pengurus kambing itu sendiri. Selama proses menernak kambing, KUBE merekrut 1 pekerja yang akan mengurus perkembangbiakan kambing. Hal ini membawa keuntungan bagi KUBE mengingat hingga saat ini jumlah hewan kambing terus bertambah.

2.7. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.7.1. Definisi Partisipasi

Pengertian partisipasi seringkali dikaitkan dengan keterlibatan. Seorang ilmuwan bernama Keith Davis mengemukakan definisi partisipasi yang

dikutip oleh Santoso Sastropoetro (1988) sebagai berikut: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral, atau perasaan dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dalam mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha tersebut." Berdasarkan pernyataan tersebut, partisipasi tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan fisik dalam pekerjaan, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional dan mental seseorang, sehingga menimbulkan tanggung jawab individu.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Gordon W. Allport menyatakan bahwa partisipasi seseorang sebenarnya melibatkan dirinya atau egonya lebih daripada sekadar keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Ini berarti bahwa keterlibatan diri tersebut juga mencakup pikiran dan perasaannya (Sastropoetro, 1988). Berdasarkan pernyataan ini, terdapat tiga unsur penting dalam partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi adalah keterlibatan lebih dari fisik tapi juga mental dan perasaan. Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran fisik dalam suatu aktivitas atau tugas. Menurut Gordon W. Allport, partisipasi sejati melibatkan keterlibatan mental dan emosional. Ini berarti seseorang harus menggunakan pikirannya untuk berpikir kritis, memberikan ide, dan menggunakan emosinya untuk merasa terhubung dengan tujuan kelompok. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap aktivitas atau proyek tersebut.
2. Ketersediaan memberikan kontribusi secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Unsur penting kedua dari partisipasi adalah kesediaan untuk memberikan kontribusi. Ini berarti bahwa individu yang berpartisipasi merasa senang dan sukarela untuk membantu kelompok mencapai tujuannya. Kesediaan ini berasal dari rasa kebersamaan dan keinginan untuk melihat kelompok berhasil. Individu yang berpartisipasi secara aktif ingin menyumbangkan waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk kepentingan kelompok.
3. Partisipasi harus ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah unsur yang menonjol dari partisipasi karena mencerminkan rasa keanggotaan

dan keterlibatan yang sebenarnya. Rasa tanggung jawab ini berarti bahwa individu merasa bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kelompok. Mereka tidak hanya berpartisipasi secara pasif, tetapi juga bertindak untuk memastikan bahwa tujuan kelompok tercapai. Adapun dalam kegiatan perencanaan pembangunan disini dibutuhkan akan pentingnya peran masyarakat, namun pada umumnya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat masih terbilang relatif terbatas. Sehingga tidak jarang terkadang masih kurang bisa dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik dari pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Keterlibatan masyarakat tersebut disebut dengan partisipasi masyarakat.

4. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam (Setiawan, 2011) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi selanjutnya.

Dari uraian tersebut mengandung maksud bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. Atau, pada kasus penelitian ini setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab atau usaha untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh desa mereka, serta memiliki kewajiban untuk mendukung program yang dilakukan desa demi kebaikan masyarakat setempat, yakni dengan ikut partisipasi dalam program PKH yang memiliki program lanjutan yakni Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.8. Landasan Teori

Teori Pemberdayaan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan, yang mana hal tersebut berfokus pada proses dan tujuan. Adapun teori ini dikemukakan oleh Edi Suharto. Menurut Suharto (2021) bahwa pemberdayaan sebagai proses melibatkan berbagai kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah di masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sementara itu, pemberdayaan sebagai tujuan berfokus pada hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Lebih lanjut, Suharto mengusulkan tiga strategi pemberdayaan yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Pemberdayaan Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan dengan klien individu melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan, nasihat, manajemen stres, dan intervensi krisis. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membimbing atau melatih klien dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Model ini sering disebut sebagai pendekatan berpusat pada tugas.

b. Pemberdayaan Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Melalui pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok sering digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap klien serta memungkinkan mereka memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Pemberdayaan Aras Makro

Pendekatan ini juga dikenal sebagai salah satu strategi sistem besar karena bertujuan untuk mengubah sistem lingkungan yang lebih besar. Beberapa strategi yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi pengembangan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian komunitas, manajemen konflik, dan lainnya. Strategi

besar ini melihat pelanggan sebagai individu yang memahami situasi mereka sendiri dan memiliki kemampuan untuk memilih serta memutuskan tindakan yang tepat.

Pada penelitian ini, program PKH KUBE berkaitan dengan bagaimana usaha pemberdayaan dan partisipasi anggota yang ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui adanya keberdayaan perempuan. Dengan demikian, penggunaan teori pemberdayaan adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPM PKH KUBE yang dilaksanakan di Kampung Terbanggi Subing tersebut sudah bisa membuat masyarakat memiliki keberdayaan dan ikut partisipasi dalam pembangunan sekaligus peningkatan taraf ekonomi keluarga masyarakat penerima manfaat di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu digunakan sebagai bahan referensi, acuan, serta landasan dalam kerangka berfikir untuk mengkaji suatu masalah yang dapat menjadi saran atau perbandingan temuan baru bagi peneliti didalam suatu penelitian. Penelitian terdahulu juga selain digunakan sebagai acuan atau referensi peneliti dalam penelitian, juga sebagai sarana uji teori yang ada pada penelitian terdahulu yaitu apakah teori yang digunakan ini masih sesuai atau tidak dengan penelitian terbaru yang diteliti.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlandaskan penelitian terdahulu ini, maka peneliti tidak akan keluar dari fokus penelitian yang sudah ditentukan oleh teori yang sudah dibuktikan dari penelitian terdahulu. Apabila hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian terdahulu, maka hasilnya mengakui akan kebenaran atau relevansi dengan teori yang digunakan, Namun jika tidak, akan dipaparkan dan dijelaskan hasil temuan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan

sarana pembandingan atau analisis dari keadaan di lapangan dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya.

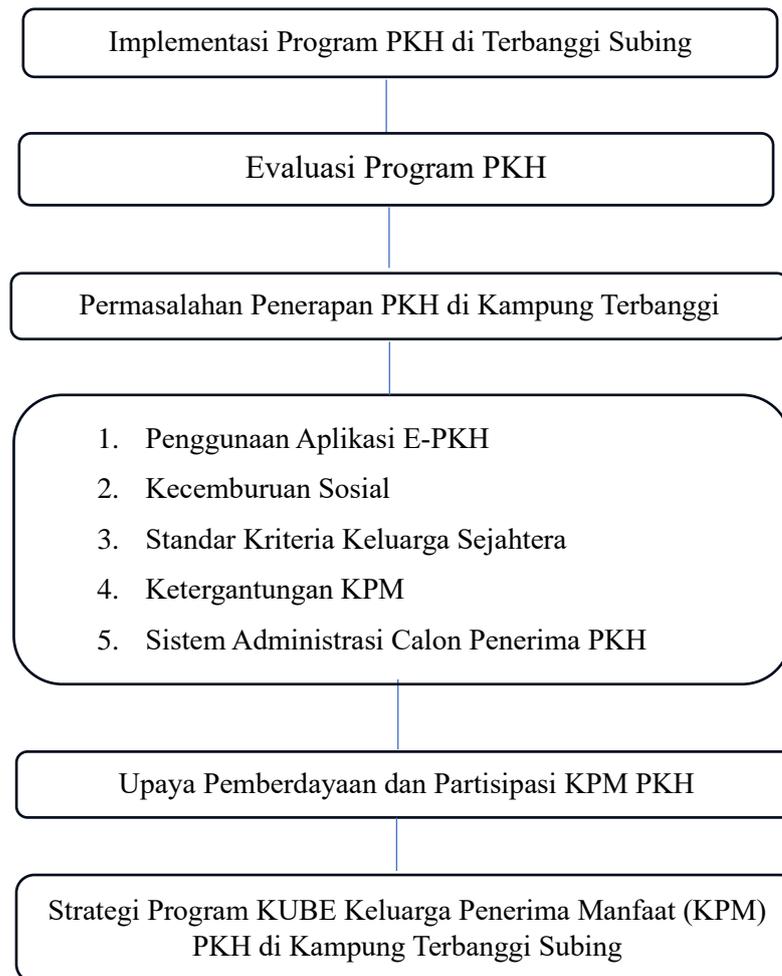
Tabel 4. Tabel Penelitian Terdahulu

Publikasi	Skripsi
Nama Peneliti	Andre Kusumawardani (2020)
Judul Penelitian	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gentungang, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.
Hasil Penelitian	Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi penelitian sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, tahapan pelaksanaan dan pendataan sudah tepat sasaran. Adapun implementasi dari PKH didampingi oleh seorang pendamping PKH yang mampu memberikan penjelasan atau segala hal yang berkenaan dengan penyaluran PKH sehingga PKH sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, kendala yang dialami warga masyarakat Desa Gentungang adalah sering terlambatnya pencairan dana yang diterima oleh keluarga penerima manfaat.
Perbedaan Penelitian	Penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi implementasinya, bukan pada apa yang sudah diberikan program PKH untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbedaannya adalah penelitian yang akan datang nantinya akan melihat bagaimana PKH dijalankan, apakah hanya sekadar pemberian bantuan dana, atau ada program yang juga membantu masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Hal tersebut sebagaimana yang diharapkan dari tujuan pelaksanaan program PKH yang dilakukan pada masyarakat perdesaan. Sehingga program akan lebih mudah membantu masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan.
Publikasi	Skripsi
Nama Peneliti	Raudhotul Jannah (2019)
Judul Penelitian	Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur
Hasil Penelitian	Pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, karena tepat sasaran, tersedianya fasilitas dan aktivitas pendampingan, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang Pendidikan. Kendala selama implementasi PKH adalah keterlambatan pemberian informasi KPM dari pemerintah pusat, serta beberapa kendala lain seperti KPM yang enggan memanfaatkan fasilitas posyandu sebagai sarana pemeriksaan kesehatan.
Perbedaan Penelitian	Bentuk penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada evaluasi program PKH dari segi pelaksanaan serta manfaatnya bagi KPM. Penelitian yang akan dilakukan lebih melihat bagaimana kondisi keluarga penerima manfaat setelah adanya program PKH yang diberikan. Serta melihat bagaimana PKH

mengeluarkan keluarga penerima manfaat dari kemiskinan masyarakat Desa.

Publikasi	Jurnal
Nama Peneliti	Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, Nur Ambia Arma (2021)
Judul Penelitian	Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rintang, Kecamatan Hamparan Perak
Hasil Penelitian	Selama Masa Pandemi, PKH banyak membantu masyarakat yang kehilangan Pekerjaannya selama pandemi, serta bisa memulihkan ekonomi. Bahkan, banyak penerima PKH tidak lagi masuk ke dalam daftar penerima manfaat karena dianggap sudah pulih dari keterpurukan dan tidak lagi berada dalam garis kemiskinan. Namun, banyak protes yang dilayangkan kepada pemerintah desa, karena mereka menganggap dirinya masih layak menerima PKH.
Perbedaan Penelitian	Penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang apa yang dilakukan PKH terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan penelitian terdahulu meneliti konflik yang timbul akibat kesalahan evaluasi dan pendataan oleh pendamping PKH. SOP dan Hasil evaluasi tidak disampaikan dengan baik sehingga muncul konflik yang membuat masyarakat penerima manfaat seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

2.10. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data Peneliti, 2023

Penelitian ini mengangkat tema terkait dengan pelaksanaan PKH di masyarakat perdesaan, yang mana Kampung Terbanggi Subing adalah salah satu kampung yang memiliki jumlah KPM terbanyak dengan urutan ketiga. Hal tersebut ternyata diketahui sebagai salah satu kegagalan PKH dalam menjangkau dan mengarahkan masyarakat miskin menjadi mandiri, sehingga masyarakat miskin menjadi tergantung dengan bantuan dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. PKH di tahun berikutnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan. Untuk itu, perlu diadakan evaluasi berupa pembaruan data, menganalisis masalah yang ditemukan dalam program PKH, dan melakukan

pembentukan program pemberdayaan yang membentuk kemandirian, sehingga membuat masyarakat 'terlihat' lebih sejahtera. Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan merupakan inisiatif dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya KPM PKH KUBE di Kampung Terbanggi Subing.

KUBE di Kampung Terbanggi Subing memiliki fokus usaha dalam pengembangan usaha di bidang peternakan. Kelompok ini sudah berjalan selama 5 tahun dan dikelola oleh KPM PKH Kampung Terbanggi Subing. Teori pemberdayaan dari Edi Suharto digunakan dalam menganalisis strategi yang digunakan oleh KUBE dalam meningkatkan keberdayaan dan partisipasi dari setiap anggota KUBE sehingga diharapkan bagi penerima PKH tersebut dapat menciptakan kemandirian dalam keberlanjutannya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka namun data tersebut berasal naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya (Creswell, 2015). Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2015).

Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2015).

Penelitian kualitatif ini dipilih karena sifatnya yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menyajikan data secara mendalam berdasarkan wawancara serta observasi sesuai dengan situasi dilapang terkait kondisi sesungguhnya terkait dengan pelaksanaan program PKH yang dilakukan di lokasi penelitian, apa saja masalah yang ditemukan ketika penerapan PKH di

Kampung Terbanggi Subing, kemudian apakah partisipasi masyarakat bisa membantu PKH terlaksana dengan baik di Kampung Terbanggi Subing.

Sedangkan pendekatan deskriptif dipilih karena akan menggambarkan suatu permasalahan sosial melalui perspektif warga setempat untuk mendapatkan suatu informasi yang riil dan akurat dikarenakan langsung dari warga setempat yang memiliki masa mukim yang lama dan mengerti kondisi dari lokasi penelitian yang akan diteliti nantinya. Cerita-cerita dari informan nantinya akan diinterpretasikan sebagai keadaan atau kondisi riil yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, yang mana gambaran yang langsung didapatkan dari warga di lokasi penelitian adalah data yang valid sehingga seluruh informasi yang didapat dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka lokasi pada penelitian ini adalah di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada hasil pra-riiset yang menunjukkan bahwa kampung Terbanggi Subing merupakan salah satu desa dengan jumlah penerima PKH cukup banyak di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang mana KPM di Desa Terbanggi Subing adalah mencapai 403 Jiwa. Bahkan jumlah tersebut terus bertambah, sehingga muncul pertanyaan apakah PKH yang dijalankan di Kampung Terbanggi Subing sudah tepat sasaran atau belum.

Selain dari banyaknya penerima PKH di Terbanggi Subing, peneliti juga tertarik dengan penerapan usaha yang dilakukan KPM PKH melalui partisipasi masyarakat, yakni dengan diadakannya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang aktif berupa usaha ternak kambing yang dijalankan oleh Keluarga Penerima Manfaat, hal tersebut membuat masyarakat terbantu perekonomiannya, mempercepat proses KPM untuk bebas dari garis kemiskinan, serta membuat masyarakat KPM mandiri, yakni memiliki bekal

apabila mereka tidak lagi menjadi penerima PKH di kemudian hari dengan usaha yang sudah dijalankan tersebut.

3.3. Fokus Penelitian

Menentukan prioritas penelitian adalah langkah penting dalam metode kualitatif. Namun, penelitian kualitatif tidak dimulai tanpa dasar atau alasan, melainkan berdasarkan persepsi seseorang terhadap suatu masalah (Moleong, 2014). Fokus penelitian sangat penting untuk membatasi masalah studi dan membantu peneliti dalam memilih data yang relevan dan mengabaikan data yang tidak relevan. Fokus pada penelitian ini adalah melihat permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan PKH dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan bantuan PKH yang tercermin dalam strategi KUBE KPM PKH di Kampung Terbanggi Subing melalui pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan kelompok.

3.4. Kriteria Informan

Penentuan informan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif tidak ada minimal jumlah sampel namun umumnya menggunakan jumlah sampel kecil. Penelitian ini peneliti memilih informan yang relevan untuk penelitian. Tujuannya adalah untuk memodelkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, pendapat khusus ini mungkin adalah siapa yang menurut kita paling tahu apa yang diharapkan atau siapa yang mempunyai otoritas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengkaji topik/situasi sosial yang diteliti. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria informan yang akan diwawancarai tersebut. Oleh karena itu, peneliti menetapkan kriteria penelitian yaitu :

1. Dinas Sosial dan Pendamping PKH yang paham terkait pelaksanaan PKH yang berwenang sebagai pelaksana kebijakan atau program yang telah di rencanakan;
2. Kepala Kampung Terbanggi Subing yang bertugas sebagai aparaturnya;

3. Tenaga Pendamping KPM PKH memiliki peran penting yang mempengaruhi kesuksesan KUBE
4. KPM PKH yang berpartisipasi aktif dalam program Kelompok Usaha Bersama.
5. Keluarga Penerima PKH Kampung Terbanggi Subing;

Penelitian ini melibatkan informan dengan karakteristik tersebut agar bisa untuk mendapatkan berbagai informasi yang lebih bervariasi namun dengan fokus pada masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Harapannya, dengan meneliti beberapa informan dengan karakteristik yang berbeda tersebut, maka akan terlihat gambaran bagaimana PKH dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan PKH untuk mensejahterakan masyarakat pra-sejahtera. Dengan wawancara dan dilibatkannya beberapa informan tersebut, nantinya akan didapatkan informasi dinamika kesejahteraan di kalangan penerima PKH di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga nantinya akan didapatkan informasi yang beragam namun tetap menggambarkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga penerima PKH di Kampung Terbanggi Subing.

3.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai dasar penelitian dalam penelitian ini, yang berupa hasil observasi dengan pengamatan langsung dan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung kepada informan terkait permasalahan yang ditemukan ketika penerapan PKH di Kampung Terbanggi Subing dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan PKH.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk bisa menunjang serta melengkapi data primer (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan diantaranya buku, beberapa literatur dan penelitian terdahulu, laporan- laporan yang didapatkan dari lokasi penelitian maupun sumber lainnya baik eksternal maupun internal yang berkaitan dengan lokasi penelitian, serta bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

3.6. Teknik Pengumpulan Informasi

Metode pengumpulan informasi adalah cara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut (Usman & Purnomo, 2014) Observasi adalah pengamatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sukmadinata (2005) juga menjelaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk memahami situasi sebenarnya dari suatu kejadian guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti akan mengamati secara langsung kondisi kehidupan keluarga penerima PKH di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada tempat berkumpulnya KUBE dan lokasi rumah ternak KUBE.

2. Wawancara

Nazir (1999) menyatakan bahwa wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dan mencapai tujuan penelitian melalui tanya jawab antara penanya dan responden. Tujuan dari wawancara Wawancara

adalah untuk menggali informasi mendalam yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya. Ini membantu peneliti memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi individu terkait topik penelitian. Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria. (Nazir, 1999). Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur saat melakukan pra riset dan melakukan wawancara terstruktur kepada informan penelitian dengan membuat pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, menggali informasi tentang bagaimana keluarga penerima manfaat memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH), kondisi ekonomi dan kesejahteraan penerima PKH di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono bahwa dokumentasi adalah dokumen yang mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, atau arsip laporan yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi nyata di lokasi penelitian (Sugiyono, 2015). Peneliti melakukan dokumentasi penelitian dengan memotret tempat lokasi usaha ternak kambing KUBE Terbanggi Subing dan dokumentasi bersama para narasumber penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan proses pemeriksaan dan interpretasi data yang terkumpul untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti. Peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga langkah ini akan dijelaskan secara rinci di bawah ini :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengeditan, dan penyederhanaan data serta informasi, yang fokusnya pada merapihkan dan mentransformasi data kasar dari catatan lapangan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa reduksi data sama seperti merangkum hal-hal pokok dalam penelitian. Proses ini berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum pengumpulan data seperti dalam menyusun kerangka teori penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan reduksi dengan data yang diperoleh seperti observasi berupa catatan lapangan, hasil wawancara, foto, video dan audio serta dokumen pelaksanaan program kemudian menganalisis dengan cara analisis catatan lapangan yang ditemukan dengan hasil wawancara yang telah didapatkan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian tentang permasalahan yang ditemukan ketika penerapan PKH di Kampung Terbanggi Subing dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan PKH yang diringkas dengan membagi dengan kebutuhan data yang telah ditetapkan peneliti sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk mengelompokkan data yang akan dipakai.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan terjadinya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan peneliti berupa teks naratif berupa catatan lapangan dan hasil wawancara. Setelah data disusun berdasarkan rumusan masalah yang diteliti terkait tentang permasalahan yang ditemukan ketika penerapan PKH di Kampung Terbanggi Subing dan strategi dalam menyelesaikan permasalahan PKH. Adanya penyajian data ini bertujuan agar informasi dan data-data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi ini dapat tersusun agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti harus menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang diperoleh dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya. Penarikan kesimpulan didasarkan kepada tujuan penelitian yang ditulis oleh peneliti dan peneliti mengacu kepada tinjauan pustaka serta teori yang digunakan dalam penelitian ini. Saran dalam penelitian merujuk kepada manfaat penelitian yang telah peneliti tulis sehingga memunculkan saran yang tepat bagi penerima manfaat. Keputusan yang diambil selama proses penelitian juga divalidasi melalui refleksi selama penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan curah pendapat, dan upaya dilakukan untuk menerapkan temuan tersebut pada kumpulan data lain

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik Keabsahan Data menurut Moleong (2006) merupakan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, analisi kasus negatif, kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian (Moleong, 2006). Sedangkan menurut Sugiyono ada tiga macam metode untuk menguji keabsahan data yang sudah diperoleh dari suatu penelitian, namun pada penelitian ini hanya menggunakan dua triangulasi data.

Proses keabsahan data pada penelitian ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tanggal 12 Januari 2024 hingga Tanggal 08 Februari 2024. Wawancara yang dilakukan pada informan 2,4,5,6,7,8, dan 9 dilakukan sebanyak 1 kali sedangkan pada informan 1 dilakukan sebanyak 2 kali. Meskipun wawancara dilakukan hingga 2 kali namun hasil wawancara tetap menunjukkan kesesuaian. Sampai data lengkap kemudian akan divalidasi dari berbagai sumber sehingga menjadi dasar penarikan kesimpulan sehingga peneliti melakukan

pencacatan data secara lengkap dan diharapkan data tersebut layak untuk dimanfaatkan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber. Dari berbagai sumber data tersebut, peneliti akan mendeskripsikan dan mengategorikan pandangan yang serupa, berbeda, dan spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Setelah data dianalisis dan kesimpulan dibuat, hasilnya akan diverifikasi (member check) dengan ketiga sumber data lainnya. Proses ini melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian, Pendamping KPM PKH dan Dinas Sosial, Kepala Kampung Terbanggi Subing, serta KPM PKH.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan ulang data kepada sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika ditemukan perbedaan data, peneliti akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan sumber data untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kampung Terbanggi Subing

Sejarah Kampung Terbanggi Subing dimulai sejak awal 1958 yang mana saat itu, Kampung Terbanggi Subing diinisiasi oleh masyarakat setempat untuk berdiri menjadi sebuah kampung yang mandiri, memisahkan diri dari Kampung Terbanggi Agung. Hingga pada bulan Oktober 1958, Kampung Terbanggi Subing resmi berdiri sampai saat ini. Adapun landasan berdirinya kampung Terbanggi Subing ini berdasarkan Pemekaran dari Kampung Terbanggi Agung Pada Tanggal 27 Agustus 1958 yang pada saat itu menjadi desa Persiapan yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu AMIR RAJA PUTTING MARGA. Pada tanggal 12 Oktober 1959 resmi menjadi Desa Definitif sampai sekarang.

Kampung Terbanggi Subing merupakan hasil pemekaran dari kampung Terbanggi Agung, dimana kampung yang mekar dari Kampung Terbanggi Subing selalu diawali dengan nama Terbanggi dan yang menurunkan Sebagai nenek moyang orang terbanggi subing adalah BETAN SUBING, maka nama terbanggi Subing di ambil dari Sejarahnya yaitu yang menurunkan orang Terbanggi Subing adalah BETAN SUBING.

Sebelum menjadi sebuah Desa definitif yang bernama Terbanggi Subing, sebutan milik Kampung Terbanggi Subing adalah Terbanggi Tatay, yang asal muasal namanya diambil dari nama sebuah sungai yang ada di Dusun I Kampung Terbanggi Subing adalah Sungai Tatay (Way Tatay). Kemudian nama tersebut dijadikan nama Dusun di bawah Kampung Terbanggi Agung. Nama tersebut tidak lagi dipakai sebagai nama kampung ketika sudah menjadi Kampung secara definitif, Hal tersebut

Desa Terbanggi Subing sudah mengalami beberapa pergantian kepala desa, berikurutan jabatan Kepala Desa Terbanggi Subing dari masa ke masa:

Tabel 5. Daftar Pejabat Kepala Kampung Terbanggi Subing

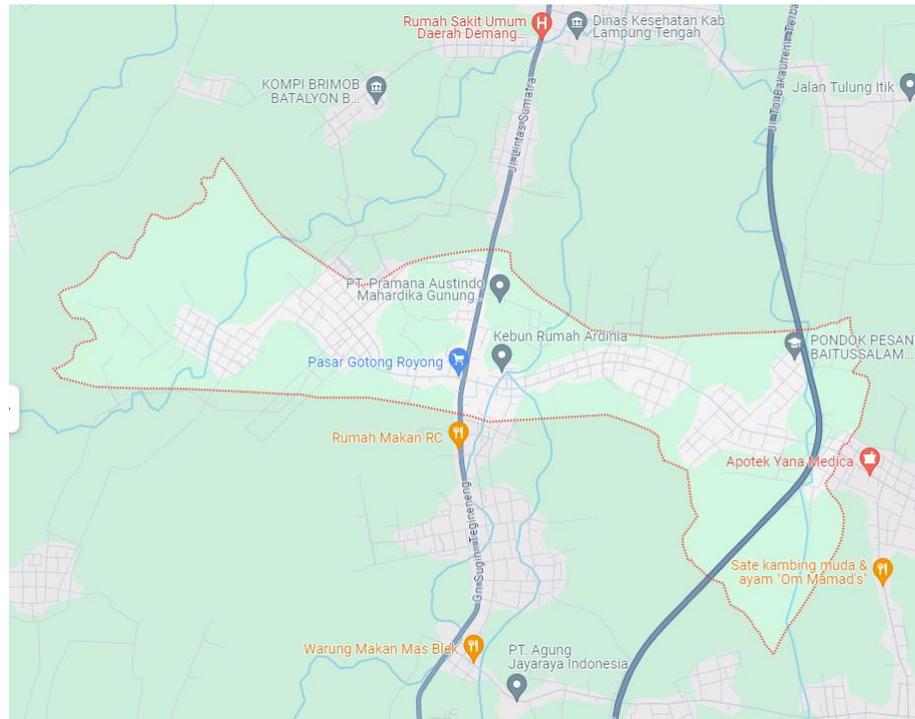
No.	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat
1.	Amir Raja Putting Marga	1958-1960
2.	Abdul Karim	1960-1966
3.	Amir Raja Putting Marga	1966-1972
4.	M. Sanusi	1972-1979
5.	Pangkat Adi Wiyono	1979-1987
6.	M. Ali Somad, TS	1988-2000
7.	Patulloh Ali KM, SE	2000-2007
8.	Hi. M. Ali Somad, TS	2007-2013
9.	Sopan Putra	2013-2019
10.	Patulloh Ali KM, SE	2019 s.d. saat ini

Sumber: Data Sekunder, 2024

Selama kurun waktu tersebut, sudah banyak kepala Kampung yang menjabat sebagai pejabat tertinggi di Kampung Terbanggi Subing dan membuat beberapa perubahan, yang mana hal tersebut berimplikasi pada keadaan monografi Desa yang dinamis dari tahun ke tahun, adapun keadaan monografi desa pada saat ini akan dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

4.2. Profil Kampung Terbanggi Subing

Bagian bab ini akan dideskripsikan profil Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun deskripsi meliputi kondisi geografis dan kondisi demografis, serta kondisi kebudayaan yang ada dilokasi penelitian ini. Deskripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang berbagai hal yang ada di Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 2. Peta Wilayah Kampung Terbanggi Subing

Sumber: Data Sekunder, 2024

Kampung Terbanggi Subing saat ini menjadi salah satu kampung yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun sebagai sebuah desa atau kampung yang berdiri sejak lama, Kampung Terbanggi Subing memiliki batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 6. Batas Wilayah Kampung Terbanggi Subing

Bagian Desa	Batas Wilayah
Sebelah Timur	Kampung Sidowaras
Sebelah Utara	Kampung Terbanggi Agung
Sebelah Barat	Kampung Wonosari
Sebelah Selatan	Kampung Bulusari

Sumber: Monografi Kampung Terbanggi Subing, 2024

Luas Wilayah Kampung Terbanggi Subing adalah sebesar 1.050 Ha yang di dalam wilayahnya terdiri atas 9 dusun dan 38 RT. Untuk jarak tempuh ataupun orbitasi atau jarak dari Kampung Terbanggi Subing dari Ibukota Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung) adalah berjarak 52 Km.

Sedangkan jarak dari Kampung Terbanggi Subing ke Ibukota Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih) adalah berjarak 8 Km.

Kampung Terbanggi Subing adalah wilayah perdesaan yang didominasi oleh sektor agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja di dibidang pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam yang tersedia di Kampung Terbanggi Subing meliputi pertanian, peternakan, dan perkebunan. Berdasarkan karakteristik dan penggunaan lahan dimanfaatkan sebagai pemukiman masyarakat, lahan pertanian, dan lahan perkebunan

4.3. Visi Misi Kampung

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kampung Terbanggi Subing mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu: "Mewujudkan Kampung Terbanggi Subing menjadi kampung yang mandiri berbasis agribisnis melalui bidang pertanian, perdagangan, dan peternakan." Perumusan misi Kampung Terbanggi Subing juga mengikuti misi yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari misi-misi berikut :

1. Membangun Ekonomi kerakyatan melalui keberagaman perekonomian daerah dengan mengembangkan fokus industri berbasis pertanian.
2. Memanfaatkan teknologi terbaru untuk pembangunan daerah yang lebih kompeten dan berwawasan lingkungan, terutama dalam teknologi pertanian.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Kampung Terbanggi Subing menetapkan Visi dan Misi Sebagai Berikut: Terwujudnya Masyarakat Terbanggi Subing yang Mandiri, Demokratis dan Handal dalam SDM serta menjadi Pusat Keunggulan Pertanian dan Peternakan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Pembangunan. Sedangkan untuk Misi Kampung, Terbanggi Subing memiliki Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Produksi pertanian.
2. Memberdayakan potensi Agroklimat secara optimal.

3. Meningkatkan SDM di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Meningkatkan Etos Kerja.
5. Mendorong Kemandirian
6. Meningkatkan kondisi kamtibmas

4.4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana di Kampung Terbanggi Subing masih belum sepenuhnya sempurna. Namun, sejak berdirinya pada tahun 1958, beberapa sarana dan prasarana telah dibangun untuk mendukung kelangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berbagai instansi atau program yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kampung Terbanggi Subing antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah
2. Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung tengah
5. Program RIS PNPM
6. Program Gerbang Sakay Sambayan.

4.5. Kondisi Kependudukan

Untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan Kampung Terbanggi Subing adalah sebanyak 1.940 KK dengan jumlah penduduk mencapai 6.634 jiwa dan menempati wilayah seluas 1.050 Ha. Adapun Jumlah penduduk total di Kampung Terbanggi Subing adalah tersebar di sebaran 9 wilayah dusun dan 38 wilayah RT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Demografis Kampung Terbanggi Subing

Kondisi Penduduk Secara Umum		
Uraian	Jumlah	Satuan
Penduduk Laki-Laki	3.407	Jiwa
Penduduk Perempuan	3.227	Jiwa
Jumlah KK	1.940	Keluarga

Sumber: Monografi Desa Terbanggi Subing, 2024

Rumah Tangga Miskin		
Uraian	Jumlah	Satuan
Kepala Keluarga RTM	733	KK
Pengangguran	87	Jiwa
Anak Putus Sekolah	41	Jiwa

Sumber: Monografi Desa Terbanggi Subing, 2024

Pekerjaan Penduduk		
Uraian	Jumlah	Satuan
Pertanian	3.701	Jiwa
Industri Kerajinan	20	Jiwa
Pedagang Kuliner	136	Jiwa
Jasa Ojek	13	Jiwa
Pertukangan	75	Jiwa
Lainnya	404	Jiwa

Sumber: Monografi Desa Terbanggi Subing, 2024

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program PKH di Kampung Terbanggi Subing belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya jumlah penurunan penerima PKH, sering dilakukannya graduasi paksa dan masih ditemukannya beberapa masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Beberapa masalah yang ditemukan dalam program PKH di Kampung Terbanggi Subing adalah penggunaan sistem aplikasi Siks-ng, belum ada standar kriteria keluarga sejahtera yang akurat, ketergantungan KPM dalam penerimaan PKH, dan masih sering ditemukan masalah pada sistem administrasi calon penerima PKH.

Adapun, terdapat partisipasi dan upaya pemberdayaan yang telah dilakukan KPM PKH dalam memanfaatkan bantuan PKH yang mereka miliki melalui pengelolaan usaha kolektif. Hal ini terbukti dari adanya KPM PKH KUBE di Kampung Terbanggi Subing yang memprioritaskan pengembangan usaha di bidang peternakan. Dalam melaksanakan usaha tersebut, KPM PKH telah menerapkan strategi pemberdayaan yang dapat dianalisis menggunakan Teori 3 Aras Pemberdayaan Edi Suharto, Strategi aras mikro dengan meningkatkan kesadaran anggota kelompok dibidang pendidikan dan kesehatan. Strategi aras mezzo melalui pendidikan, sosialisasi, dan pendampingan kelompok. Strategi aras makro dengan keberhasilan kelompok dalam pengembangan usaha kolektif sehingga menimbulkan kekuatan atau keberdayaan bagi setiap KPM PKH yang tergabung di dalam KUBE Terbanggi Subing.

6.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini, antara lain :

1. KPM PKH

Meningkatkan kesadaran untuk melakukan gradasi mandiri bila kondisi ekonomi masyarakat sudah lepas dari syarat penerima bantuan dan memaksimalkan pengetahuan yang telah diperoleh dari berbagai pelatihan dan sosialisasi yang telah diberikan untuk dapat lebih mandiri, baik dilakukan secara individu maupun kolektif.

2. Pendamping PKH

Pendamping PKH Terbanggi Subing dapat terus meningkatkan pengetahuan tentang kriteria penerima bantuan PKH dan pendamping terus melakukan advokasi kepada dinas sosial dalam meningkatkan evaluasi pada setiap kendala yang ditemukan dilapangan, seperti kurang jelasnya standar kriteria calon penerima maupun calon exit penerima bantuan dan pemberhentian penggunaan aplikasi E-PKH dalam pelaporan penerima bantuan. Hal ini perlu dilakukan agar meminimalisir kesalahan sasaran penerima bantuan.

3. Dinas Sosial

Dalam melakukan peningkatan pelayanan yang lebih optimal pada pelaksanaan PKH maka dinas sosial dapat terus melakukan inovasi dan segera menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan oleh mitra program keluarga harapan yaitu pendamping PKH, aparat kampung, dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan PKH di Lampung Tengah, terutama di Kampung Terbanggi Subing dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Jannah, R. (2019). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate, Jakarta Timur*. Jakarta: Skripsi UIN Jakarta.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kementerian Sosial. (2021). *Buku Pedoman Pelaksanaan PKH*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.
- Kusumawardani, A. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. *Jurnal Madani*, 64-74.
- Salman, R. (2018). *Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru: Skripsi Universitas Islam Riau.
- Sastropoetro, S. R. (1988). *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni Bandung.
- Setiawan, A. H. (2011). *Perekonomian Indonesia*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Soekanto, S. (1999). *Kamus Sosiologi Edisi Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indoensia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22-28.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan UGM*, 121-130.
- Suud, M. (2006). *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Kalimantan Tengah: BPAD Kalimantan Tengah.
- Usman, & Purnomo. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, D., & Rejekiningsih, T. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 83-97.
- Yustina. (2021). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.